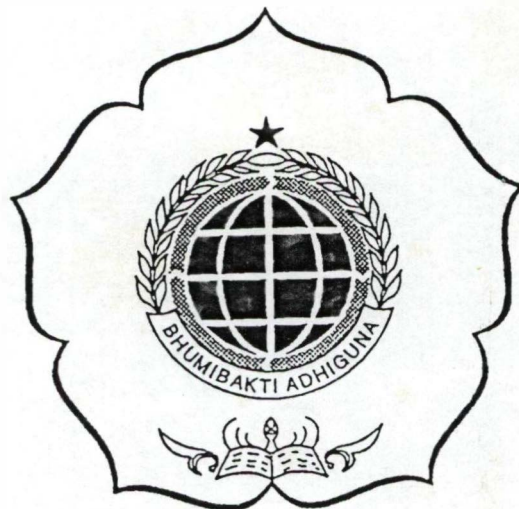


**PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP  
PERSEDIAAN TANAH SAWAH DAN PRODUKSI PADI  
DI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG  
PROPINSI JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

**FATHURAHMAN**

**NIM : 9651005**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Tanah sebagai tempat dilaksanakannya pembangunan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemakmuran rakyat, maka tanah itu harus menjadi tempat bagi proyek-proyek yang bisa memberikan atau mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya. Penggunaan tanah dan pembangunan adalah dua hal yang selalu menyatu.

Pembangunan pada dasarnya adalah merubah suatu keadaan ke keadaan lain, yaitu suatu perubahan penggunaan tanah yang ada ke perubahan penggunaan tanah yang diinginkan atau direncanakan.

Kecamatan Cikande adalah kecamatan yang dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagian wilayahnya diperuntukan pengembangan industri. Sebagai konsekuensinya diperlukan tempat (tanah) untuk menampung perkembangan industri tersebut, sementara itu Kecamatan Cikande juga merupakan wilayah yang penggunaan tanahnya adalah pertanian tanah sawah, untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa besar perubahan luas tanah sawah dan produksi padi akibat perkembangan industri.

Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (explanatory research), objek telaahan penelitian eksplanasi adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan sistim analisis Product Moment dari Pearson. Jenis penelitian ini adalah penelitian populasi. Penelitian ini untuk menguji hubungan antara variabel perkembangan industri dengan luas tanah sawah serta menguji hubungan variabel perkembangan industri dengan produksi padi.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan industri memberikan pengaruh yang cukup besar, ini dapat dilihat dari perkembangan industri yang ada dibangun dengan menggunakan tanah-tanah pertanian khususnya tanah persawahan. Oleh karenanya terjadi perubahan luas tanah sawah seluas 420 hektar dalam kurun waktu tujuh tahun dari tahun 1993 sampai tahun 1999, sehingga setiap tahunnya mengalami perubahan luas tanah sawah ke non pertanian seluas 60 hektar atau 14,28%. Sedangkan untuk produksi padi terdapat perubahan penurunan produksi sebesar 1.828 ton selama tahun 1993 sampai 1999, sehingga penurunan produksi padi per tahun adalah 261 ton atau 14,28%.

Mengingat lahan persawahan tidak dapat dicetak di sembarang tempat, dalam arti perlu persyaratan-persyaratan tertentu maka tanah-tanah sawah yang ada perlu dipertahankan, sehingga dalam pemilihan lokasi untuk industri diusahakan pada tanah-tanah yang tidak atau kurang produktif. Bila dalam menempatkan lokasi industri terpaksa harus menggunakan tanah-tanah pertanian yang ada, hendaknya dipertimbangkan bahwa jenis penggunaan tanah yang baru mempunyai kepentingan umum yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat penggunaan yang digantikannya.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	9
A. Tinjauan Pustaka .....	9
B. Kerangka Pemikiran .....	14
C. Hipotesis .....	17
BAB III METODE PENELITIAN .....	18
A. Daerah Penelitian .....	18
B. Populasi .....	19
C. Jenis dan Sumber Data .....	19
D. Teknik Pengumpulan Data .....	20
E. Teknik Analisa Data .....	21
F. Sistematika Penulisan .....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH/DAERAH PENELITIAN .....	26
A. Keadaan Fisik Wilayah .....	26
1. Letak Wilayah dan Administrasi Kecamatan Cikande .....	26
2. Pembagian Wilayah .....	26
3. Kemampuan Tanah .....	27
4. Penggunaan Tanah .....	32
B. Keadaan Penduduk .....	33
1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk .....	33
2. Komposisi Penduduk .....	36
3. Mata Pencaharian Penduduk .....	37

2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Industri .....	41
3	Penetapan Lokasi Untuk Industri .....	42
4	Jenis-jenis Industri .....	43
5	Perkembangan Industri .....	44
6	Penyebaran Industri .....	45
7	Korelasi Antara Pertambahan Jumlah Industri dengan Persediaan Tanah Sawah .....	46
B.	Penurunan Produksi Padi yang disebabkan Oleh Perkembangan Industri .....	52
1.	Korelasi antara Perkembangan Pembangunan Industri dengan Produksi Padi .....	52
2.	Upaya-upaya yang Mempengaruhi Peningkatan Produksi Padi ..	58
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....		62
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENYUSUN		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sumberdaya tanah bersifat multi fungsi dalam aktivitas kehidupan manusia baik untuk kegiatan fasilitas atau penggunaan tempat seperti untuk pemukiman, perkantoran, industri, jalan dan sebagainya maupun untuk kegiatan ekstraktif seperti pertanian dan pertambangan.

Pembangunan pertanian tidak bisa lepas dari sumberdaya tanah yang merupakan faktor produksi dari kegiatan sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga sejak Repelita I sampai sekarang pembangunan sektor pertanian memperoleh prioritas utama. Selama ini sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal peningkatan produksi bagi penyediaan pangan dan bahan baku industri, peningkatan ekspor serta peningkatan pendapatan petani. Dalam tahap-tahap pembangunan yang akan datang, sektor pertanian diharapkan masih berperan dalam menunjang pembangunan nasional.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mengisi dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri, melalui pertanian yang maju, efisien dan tangguh, sehingga makin mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengelolaan produksi dan



Melihat kenyataan tersebut, dapat diperoleh gambaran betapa sektor pertanian yang mendukung sektor pertanian memegang peranan penting dan strategis dalam gerak pelaksanaan pembangunan menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam GBHN 1999 yang dinyatakan bahwa :

Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia, mutlak dilaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya yaitu di bidang ekonomi sebagai titik berat yang merupakan penggerak utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua. Oleh karena itu dalam Repelita VII prioritas diletakkan pada Pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya.

Usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi dilakukan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan melalui serangkaian Repelita. Di dalam pembangunan jangka panjang direncanakan terjadi transformasi struktural perekonomian dari struktur agraris menjadi struktur industri. Ini berarti bahwa hasil pelaksanaan pembangunan pada setiap tahap diharapkan akan meningkatkan industrialisasi.

Pembangunan sektor industri sebagai bagian dari usaha pembangunan bidang ekonomi, merupakan usaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat,

Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya akan membawa kemakmuran rakyat.

Pembangunan industri mencakup segala bentuk dan macam usaha pembangunan dan pengembangan industri, sehingga dalam prosesnya dikembangkan secara terarah dan terpadu dengan keterkaitan sektor-sektor lainnya. Oleh karenanya pembangunan industri tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor lainnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Pembangunan industri hendaknya dikembangkan secara terpadu, baik dalam lingkungan sektor industri sendiri maupun dalam hubungannya dengan sektor lainnya, sebab pembangunan sektor industri tidak hanya erat kaitannya dengan kemampuan penyediaan bahan baku, tetapi juga dengan sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, konstruksi, perdagangan, keuangan dan perbankan, perhubungan, pendidikan, tenaga kerja dan sebagainya. (Ali Murtopo, 1982:59).

Kegiatan pembangunan industri serta kegiatan ekonomi lainnya terus meningkat, sehingga penyediaan dan pengadaan tanah untuk pembangunannya semakin meningkat pula. Di lain pihak dengan adanya pertumbuhan penduduk berarti permintaan akan bahan makanan dan tanah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga meningkat, baik untuk keperluan pertanian maupun non pertanian.

Tanah pertanian terutama tanah sawah yang menjadi sumber produksi pangan bagi masyarakat semakin berkurang sebagai akibat digunakan untuk berbagai keperluan di bidang non pertanian. Hal ini mengakibatkan daya dukungnya sebagai faktor produksi pangan semakin berkurang, sehingga diperlukan usaha-usaha untuk dapat menentukan dan penilaian terhadap tanah-tanah yang digunakan sebagai tanah pertanian

Untuk mewujudkan tujuan di atas perlu diadakan upaya pengendalian terutama pengendalian dalam memberikan arahan lokasi pembangunan, serta mencegah/mengendalikan perubahan penggunaan tanah yang disebabkan oleh pembangunan tersebut. Sementara itu persediaan tanah di suatu wilayah adalah terbatas, karena merupakan jumlah luas tanah yang ada dalam batas unit wilayah tertentu yang boleh digunakan untuk kegiatan usaha.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu disusun rencana persediaan tanah sebagai rencana dasar penggunaan tanah atau pola dasar tata guna tanah. Penyusunan rencana persediaan tanah dimaksudkan untuk melindungi tanah dari kerusakan dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga kebutuhan tanah di masa mendatang dapat terpenuhi.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan penduduk, akibat bertambahnya jumlah penduduk, akan mengakibatkan pula meningkatnya kebutuhan tanah, terutama tanah sawah. Oleh karena itu persediaan tanah sawah perlu dipertahankan dari kegiatan perubahan penggunaan tanah yang mengakibatkan berkurangnya persediaan tanah sawah dan produksi padi.

Bertumpunya swasembada beras nasional pada produksi padi di Jawa didasarkan pada kenyataan bahwa Pulau Jawa merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang memiliki infrastruktur dan kelembagaan pertanian yang paling lengkap dan sesuai untuk pengembangan sistem ekonomi pertanian yang bertumpu pada komoditas padi. Pada sisi lain, Pulau Jawa juga merupakan pulau yang telah mengalami transformasi struktur ekonomi yang paling pesat dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, transformasi itu ditandai oleh semakin meningkatnya peranan sektor industri dan jasa serta berkurangnya sektor pertanian. (Sony Bachtiar, 1998 : 14)



pesat, selain itu merupakan kecamatan yang mayoritas penggunaan tanahnya adalah pertanian khususnya penggunaan tanah sawah.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang kemudian dituangkan dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul :

**“PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERSEDIAAN TANAH SAWAH DAN PRODUKSI PADI DI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG PROPINSI JAWA BARAT.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian pada umumnya bukanlah merupakan perubahan yang terencana, akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan atas keadaan yang mendesak dalam memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya manusia menggunakan tanahnya untuk suatu usaha dengan tujuan memperoleh hasil. Jika manusia dalam menggunakan tanahnya dengan jalan merubah penggunaan dari yang telah terjadi sebelumnya, manusia tersebut cenderung menginginkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan menguntungkan dari yang sebelumnya. Akan tetapi apabila perubahan tersebut dilaksanakan secara tidak berencana, maka akan dapat menimbulkan konflik dalam penggunaan tanah.

Tersedianya tanah yang relatif terbatas dan bersifat tetap, sedangkan jumlah penduduk selalu bertambah dengan segala kebutuhan dan aktifitasnya, menyebabkan tanah menjadi sumber yang langka sekaligus sumber masalah. Hal ini seperti dikemukakan oleh Imam Soetiko (1990:10) bahwa : Masalah tanah dalam masa

pembangunan adalah sangat penting, karena tiap pembangunan membutuhkan tanah entah sebagai faktor produksi atau sebagai ruang.

Akibat terbatasnya tempat untuk pembangunan fasilitas fisik seperti perumahan, perkantoran, industri, perdagangan serta sarana lainnya di kota Serang, maka kegiatan pembangunan tersebut mulai mengarah ke daerah-daerah pinggiran kota. Salah satu daerah yang letaknya di pinggiran kota Serang adalah Kecamatan Cikande, yang merupakan daerah pengembangan pembangunan terutama industri. Penggunaan tanah di daerah pinggiran kota atau pedesaan biasanya merupakan tanah pertanian yang subur dan potensial sebagai sumber penghidupan petani. Tanah-tanah inilah pada umumnya dikorbankan untuk pembangunan industri.

Kebanyakan industri memerlukan lokasi yang dekat dengan ketersediaan berbagai fasilitas seperti air, tenaga listrik, transportasi, telekomunikasi, tenaga kerja dan prasarana sehingga menghendaki lokasi pada daerah-daerah yang telah berkembang yang pada umumnya merupakan tanah pertanian yang subur (Herutomo Soemadi, 1993:9).

Dengan semakin berkembangnya industri di Kecamatan Cikande, banyak menarik minat pengusaha di bidang industri. Hal ini berarti bahwa kebutuhan tanah untuk keperluan industri semakin meningkat pula, sehingga usaha tersebut terpaksa mendesak kaum petani untuk melepaskan tanah usahanya. Akibatnya tanah pertanian baik tanah sawah maupun non sawah semakin berkurang, bahkan tidak menutup kemungkinan produksi padi dari tanah sawah semakin menurun.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Berapa besar perubahan luas tanah sawah akibat perkembangan industri ?
2. Berapa besar perubahan produksi padi akibat perkembangan industri ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian yang akan dilaksanakan di batasi lingkup penelitiannya sebagai berikut :

1. Perkembangan industri adalah bertambahnya jumlah industri di suatu wilayah secara bertahap yang pada akhirnya bisa merupakan daerah kawasan industri, sehingga perkembangan industri yang diteliti adalah kegiatan industri dalam arti yang memerlukan tanah atau ruang tersendiri, yaitu industri besar.
2. Persediaan tanah sawah adalah tersedianya tanah sawah yang didasarkan atas kondisi fisik tanah, yaitu faktor lereng dan ketinggian sesuai dengan Konsep Wilayah Tanah Usaha.
3. Produksi padi adalah hasil padi yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha tani dalam bidang pertanian tanah sawah. Jadi produksi padi yang dimaksud ialah hasil dari tanaman padi sawah yang diperoleh petani pada saat panen, yang dihitung dalam bentuk produksi Gabah Kering Giling (GKG).
4. Penelitian dilakukan pada tingkat kecamatan terhadap perkembangan pembangunan industri dan tanah sawah serta produksi padi dari tahun 1993 sampai tahun 1999.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui berapa besar perubahan luas tanah sawah akibat perkembangan industri.
- b. Untuk mengetahui berapa besar perubahan produksi padi akibat perkembangan

## **2. Kegunaan Penelitian.**

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui adanya perubahan luas persediaan tanah sawah dan produksi padi yang disebabkan oleh perkembangan industri.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait khususnya Badan Pertanahan Nasional dalam mengambil keputusan di bidang pertanahan terutama yang berkaitan dengan pemberian ijin perubahan penggunaan tanah dan pemberian ijin lokasi.
- c. Sebagai sumbangan ilmu pendidikan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga dapat memberikan masukan dan dorongan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil-hasil uraian pada bab terdahulu, maka beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut :

1. Perkembangan industri di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang yang diteliti dari tahun 1993 sampai tahun 1999, menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar, ini dapat dilihat dari perkembangan industri yang ada banyak dibangun dengan menggunakan tanah-tanah pertanian khususnya tanah persawahan. Oleh karenanya persediaan tanah pertanian khususnya tanah persawahan di bidang ini semakin lama akan semakin berkurang. Perubahan luas tanah sawah yang disebabkan perkembangan industri seluas 420.00 hektar dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, sehingga setiap tahunnya mengalami perubahan luas tanah sawah seluas 60 hektar atau 14,28%.
2. Dengan semakin berkembangnya industri yang mengakibatkan perubahan luas tanah-tanah persawahan ternyata mengakibatkan pula perubahan produksi padi di Kecamatan Cikande mengalami penurunan, yaitu sebesar 1.828 ton selama tahun 1993 sampai 1999, sehingga penurunan produksi padi rata-rata pertahun adalah 261 ton atau 14,28%.

#### **B. Saran**

Dengan adanya perkembangan industri di Kecamatan Cikande Kabupaten



perumahan, jasa dan industri. Hal ini seharusnya diikuti dengan adanya penyerapan tenaga kerja di sektor jasa dan industri. Perkembangan industri yang ada di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang seharusnya memperhatikan persediaan tanah sawah, mengingat tanah persawahan tidak dapat dicetak disembarang tempat, dalam arti perlu persyaratan-persyaratan tertentu, maka tanah-tanah sawah yang ada perlu dipertahankan, sehingga dalam pemilihan lokasi untuk industri diusahakan pada tanah-tanah yang tidak atau kurang produktif.

Bila dalam menempatkan lokasi industri terpaksa harus menggunakan tanah-tanah pertanian yang ada, hendaknya dipertimbangkan bahwa jenis penggunaan tanah yang baru mempunyai kepentingan umum yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat penggunaan yang digantikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Arikunto, Suharsimi (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
2. Bachtiar, Sony (1998), “Dampak Alih Guna Tanah Pertanian Terhadap Pergeseran Kerja dan Menurunnya Produksi Pangan Nasional (studi kasus di Jawa)”, Jurnal Pertanahan 14, 13 – 25.
3. Faisal, Sanapiah (1999), Format-Format Penelitian Sosial, Rajawali Pers, Jakarta.
4. Hanny, (1998). Studi Tentang Perubahan Penggunaan Tanah di Wilayah Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Skripsi, Jurusan Perpetaan, STPN, Yogyakarta.
5. Harsono, Soni (1996), Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BPN, Jakarta.
6. Moertopo, Ali (1989), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
7. Nazir, Moh (1985), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
8. Pollard, A.H et all, (1984) Teknik Demografi, Bina Aksara, Jakarta.
9. Sandy, I Made, (1977), Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia, Publikasi Nomor 75, Dit. Tata Guna Tanah, Dirjen Agraria, Depdagri, Jakarta.
10. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996). Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.
11. Silalahi, SB (1989), Masalah Pertanahan Dalam Pembangunan, Direktorat Penatagunaan Tanah, BPN, Jakarta.
12. Singarimbun, Masri et all, (1995), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
13. Sitorus, R.P. Santun, (1985), Evaluasi Sumber Daya Lahan, Tarsito, Bandung.
14. Sumadi. Herutomo (1993), Pengelolaan Tata Guna Tanah, Cetakan Pertama, BPN,

16. Soetiknyo, Imam (1990), Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Agraria, Yogyakarta.
17. Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR nomor II/MPR/1993, Kebijakan Pembangunan Lima Tahun VI, BP-7 Pusat, Jakarta.
18. Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1999, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Nomor 30 tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat II Serang tahun 1996/1997 – 2006/2007.
23. \_\_\_\_\_ 1983, Tata Cara Kerja I, edisi ke empat, Dit Tata Guna Tanah. Ditjen Agraria, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.